

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian tentang Manajemen Perubahan Komunitas

2.1.1 Definisi Manajemen Perubahan Komunitas

Manajemen merupakan kegiatan dalam menggerakkan sumber daya manusia dan seluruh fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan pendayagunaan sumber daya melalui fungsi dari manajemen itu sendiri (pengorganisasian, pengendalian, perencanaan dan penggerakan) dengan strategi yang dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan (Rahmadyah et al., n.d.). Manajemen perubahan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan menuju ke arah lebih baik untuk mempengaruhi perubahan individu maupun komunitas (Pamungkas, Susilowati, Kartika, 2021).

Menurut Ocktilia (2020) menjelaskan bahwa komunitas adalah sebuah kelompok kecil dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan pada umumnya memiliki ketertarikan dan habitat sama, serta ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Kekuatan pengikat suatu komunitas yang paling utama adalah interaksi sosial yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial dengan kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial, ekonomi. Sekumpulan orang akan menjadi sebuah komunitas jika memiliki aktivitas dan minat terhadap suatu hal serta dipersatukan di tempat dan waktu yang sama.

Menurut Brokensha dan Hodge dalam Isbandi (2013: 169) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang secara

kooperatif dan harus berhubungan dengan pemerintahan lokal terdekat untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat. Perubahan komunitas dalam lingkup pengembangan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendayagunaan sumber yang ada di masyarakat itu sendiri (Engkus, et al. 2020).

Manajemen perubahan komunitas merupakan praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas yang dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu komunitas dengan memanfaatkan kemampuannya (*self help*) dan aksi-aksi yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dengan memberikan akses kepada pelayanan sosial lokal sesuai dengan kebutuhan (Forde dan Lynch, 2014).

Berdasarkan berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan komunitas merupakan proses terencana dan sistematis sebagai bentuk intervensi pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memberikan perubahan positif dalam suatu masyarakat melalui pengoptimalisasian sumber yang ada dan menekankan pada partisipasi dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi dan mengimplementasikannya. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang akan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan suatu proses perubahan komunitas dalam lingkup pengembangan masyarakat tentu sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber atau dapat juga disebut dengan istilah aset komunitas yang merupakan modal dasar sebagai bentuk mempercepat dan memperkuat proses perubahan, maka penting untuk membahas terkait aset komunitas didalam penelitian ini.

2.1.2 Aset Komunitas

Menurut Isbandi (2008) mengemukakan bahwa suatu komunitas pasti mempunyai aset yang merupakan kekayaannya. Aset komunitas yang melekat dalam pengembangan masyarakat, sebagai berikut:

1. Modal Fisik (*physical capital*) merupakan salah satu modal dasar yang terdapat dalam kehidupan setiap masyarakat. Modal fisik terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu bangunan dapat berupa rumah, pertokoan, perkantoran, gedung perniagaan dan sebagainya, serta infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon dan sebagainya. Bangunan maupun infrastruktur merupakan aset yang penting dalam kehidupan masyarakat, dimana memadainya keberadaan modal fisik tersebut dalam suatu komunitas seringkali dijadikan sebagai indikator berkembang atau tidaknya sebuah komunitas.
2. Modal Lingkungan (*environmental capital*) merupakan nilai yang penting dalam suatu komunitas dan dapat diakses maupun dimanfaatkan oleh masyarakat atau berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Modal ini terdiri dari berbagai aspek lingkungan yang harus dipertimbangkan, seperti bumi, udara, laut, tumbuhan dan binatang.
3. Modal Finansial (*financial capital*) merupakan dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas dan dapat digunakan untuk mendukung proses pembangunan sehingga menjadi modal yang diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan suatu komunitas. Salah satu indikator yang

menggambarkan modal keuangan masyarakat ini adalah dengan melihat banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

4. Modal Manusia (*human capital*) merupakan kekuatan masyarakat yang menjadi titik tolak berkembangnya suatu negara dan berkaitan dengan unsur manusia yang menjadi modal dasar pembangunan. Modal manusia dapat dilihat dari sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Modal Teknologi (*technology capital*) merupakan keberadaan teknologi yang tepat guna dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Teknologi yang dimaksud tidak selalu berarti canggih dan modern, akan tetapi ketersediaan teknologi yang memiliki nilai guna di masyarakat setempat.
6. Modal Sosial (*social capital*) merupakan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, sehingga mengatur pola perilaku warga serta unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat maupun kelompok masyarakat. Modal sosial terdiri dari tiga macam yaitu : a. *Bonding capital*, merupakan modal sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam suatu kelompok tertentu. b. *Bridgeing capital*, merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda. c. *Linking capital*, merupakan suatu ikatan antara kelompok masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok masyarakat yang berdaya (*powerfull people*).

Berdasarkan penjelasan terkait setiap komunitas memiliki aset yang melekat guna meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Aset dalam suatu

komunitas juga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi - fungsi komunitas dengan cara memaksimalkan potensi aset tersebut karena memiliki peran yang sangat penting, maka pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menjabarkan terkait fungsi - fungsi komunitas.

2.1.3 Fungsi Komunitas

Menurut Netting, Kettner dan McMurtry (2010: 130-131), terdapat lima fungsi komunitas yaitu meliputi:

1. Fungsi Produksi, Distribusi dan Konsumsi merupakan kegiatan - kegiatan masyarakat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan material terutama kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (makanan, pakaian, perumahan, kesehatan) dan sejenisnya. Saat ini setiap orang saling memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu yang berupa barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Fungsi Sosialisasi merupakan aktivitas dalam memahami individu dan populasi, perlu untuk memahami norma, tradisi, dan nilai masyarakat karena pada generasi muda akan meneruskan atau mewariskan hal - hal yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengawasan Sosial merupakan proses yang menekankan anggota masyarakat untuk dapat senantiasa menjamin kepatuhan terhadap nilai dan norma yang dianut, sehingga diharapkan dapat mentaatinya melalui penetapan hukum, peraturan dan sistem-sistem penegakkannya. Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga yang mewakili berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, agama dan pelayanan sosial.

4. Fungsi Partisipasi Sosial meliputi interaksi dengan orang lain dalam masyarakat atau bergabung dengan kelompok, asosiasi dan organisasi yang menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekspresikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan kesempatan sosial guna membangun pertolongan alamiah dan mendukung jaringan sosial.
5. Fungsi Gotong Royong merupakan dukungan keluarga, teman, tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi - asosiasi profesional yang bergabung dalam sebuah masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. Berbagai profesi pertolongan berkembang sebagai respon terhadap ketidakmampuan lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga hadir untuk menata, menggalang dan memobilisasi kebutuhan akan dukungan masyarakat terhadap suatu masalah yang dirasakan.

Memahami fungsi komunitas dalam manajemen perubahan komunitas sebagai langkah awal yang penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan sebagai mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan aset komunitas secara optimal, maka fungsi - fungsi komunitas dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota komunitas karena diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan cara mewujudkan perubahan komunitas secara optimal melalui pemahaman dari berbagai model dan dipilih yang paling sesuai dengan fokus penelitian terkait upaya pengembangan desain teknologi pekerjaan sosial pada fungsi manajemen di tahap perencanaan.

2.1.4 Model Perubahan Komunitas

Dalam manajemen perubahan komunitas secara umum memiliki tiga model besar yang dikembangkan oleh Jack Rothman (dalam Harahap, 2020), yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*).

Proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menemukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Merujuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok - kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima pelayanan” (*beneficiaries*). Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (*expert*) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program pelayanan.

3. Aksi Sosial (*Social Action*)

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan

fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi ‘korban’ ketidakadilan struktur. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Berdasarkan model manajemen perubahan komunitas yang telah dijabarkan tersebut, maka fokus penulisan pada laporan penelitian ini menggunakan model pengembangan masyarakat lokal yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting pada tahap perencanaan sebelum melaksanakan suatu program pelayanan yaitu dengan melibatkan masyarakat sejak awal pelaksanaan proses, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil dari teknologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu hal yang mendasari keberhasilan pada setiap model manajemen perubahan komunitas yaitu adanya prinsip - prinsip sebagai landasan dan nilai yang dianut dalam setiap model. Konsep tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

2.1.5 Prinsip Manajemen Perubahan Komunitas

Menurut Dewi (2021) “perubahan komunitas didalam pengembangan masyarakat diselenggarakan berdasarkan tujuan untuk mencapai kondisi masyarakat melalui transformasi sosial - budaya, politik, ekonomi, dan teknologi secara berkelanjutan”.

Dalam manajemen perubahan komunitas, ada tiga prinsip umum program pengembangan masyarakat (Habib, 2021), yaitu:

1. Berbasis masyarakat (*community-base*) atau masyarakat sebagai pelaku utama atau subyek dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Berbasis sumberdaya setempat (*local resources-base*), yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada.
3. Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan.
4. Saling belajar dan berbagi pengalaman, salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat.

Jim Ife (dalam Lukman 2019) mengemukakan bahwa “pengembangan masyarakat di dalamnya memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat termasuk pekerja sosial”.

Prinsip-prinsip manajemen perubahan komunitas tersebut diantaranya; *Integrated Development* (pengembangan yang bersifat terpadu), *Confronting Structural Disadvantage* (menentang struktur yang tidak menguntungkan masyarakat), *Human Right* (hak asasi manusia), *Sustainability* (berkelanjutan), *Empowerment* (pemberdayaan), *The Personal and The Political* (personal dan politik), *Community Ownership* (kepemilikan masyarakat), *Self Reliance* (kemandirian dan berdikari), *Independence from the state* (kemandirian dan tidak menggantungkan diri kepada negara), *Immediate goals and ultimate visions* (tujuan jelas dan visi yang baik), *Organic development* (pengembangan organisasi), *The peace of development* (pengembangan yang damai), *External expertise* (mengakui kepakaran dari eksternal), *Community building* (membangunkan masyarakat), *Process and Outcome* (proses dan hasil), *The Integrity of Process* (integritas

proses), *Non-violence* (tanpa kekerasan), *Inclusiveness* (ketercapaian), *Cooperation* (kerjasama), *Participation* (partisipasi), dan *Defining need* (kebutuhan).

Berdasarkan uraian prinsip - prinsip tersebut, dalam penelitian ini prinsip yang sesuai adalah pengembangan masyarakat yang bersifat terpadu dengan melihat proses dan hasil berbasis partisipasi sumberdaya setempat dan berkelanjutan. Setelah memahami prinsip yang mendasari perubahan komunitas dengan memberikan pemahaman untuk peneliti, maka pada penelitian ini juga perlu untuk membahas terkait peran pekerja sosial dalam dinamika komunitas sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan potensi komunitas.

2.1.6 Proses dalam Manajemen Perubahan Komunitas

Pengembangan masyarakat bisa disebut juga sebagai intervensi komunitas dan merupakan salah satu metode atau pendekatan inti yang menunjukkan keunikan pekerjaan sosial, serta membedakannya dengan profesi lain karena banyak disiplin ilmu yang mengklaim memiliki keahlian dalam bekerja dengan individu, keluarga dan kelompok, namun hanya sedikit profesi yang menfokuskan pada keberfungsian klien dalam konteks organisasi, masyarakat dan kebijakan. (Suharto, 2005).

Pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas. Proses pengembangan masyarakat pada dasarnya mencakup tiga tahapan utama:

1. Memahami komponen-komponen penting yang akan dikenai perubahan sosial, yaitu masalah, populasi, masyarakat dan organisasi dengan lengkap dan akurat;
2. Membangun dukungan agar perubahan dapat diterima;

3. Merancang strategi dan taktik agar perubahan dapat dilakukan; dan
4. Menyiapkan rencana atau desain program, mengimplementasikan dan mengevaluasi keefektifannya.

Menurut Netting, et al., dalam Suharto (2005) mengatakan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan dalam pengembangan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh klien atau sasaran perubahan. Perancangan program pengembangan masyarakat mencakup sedikitnya tujuh langkah, mulai dari perumusan nama program hingga pengevaluasian hasil - hasil penerapan program tersebut yang dapat dilakukan setelah masalah, populasi, masyarakat dan organisasi dipahami, dukungan diperoleh dan strategi serta taktik tersusun, namun proses ini bukan tahapan yang kaku melainkan dapat dilakukan secara kebalikannya.

Netting (2001) mengatakan bahwa pekerja sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas. Sejalan dengan pendapat tersebut, Edi Suharto (2010) juga menyatakan bahwa, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara dengan mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar yang berkelanjutan.

Pengembangan masyarakat adalah model intervensi komunitas yang dipandang sebagai program maupun proses dan didalam pelaksanaannya terdapat unsur pendampingan dan pengembangan bagi masyarakat. Proses pelaksanaan intervensi komunitas menurut Netting (2004), tahapan praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Inisiasi Sosial

Kegiatan guna mengawali praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas, diawali dengan melakukan kontak pendahuluan, memahami karakteristik masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat hingga terbangun kesiapan dan kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan dengan teknik yang digunakan adalah, sebagai berikut:

- a. *Community involvement* adalah hubungan yang dibangun dengan publik (stakeholder, media, masyarakat, dan lainnya). Teknik ini dapat dilakukan dengan meleburkan diri atau melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal maupun informal, baik individu maupun kelompok untuk menciptakan keterbukaan dalam memberikan informasi.
- b. *Home visit* atau kunjungan rumah, merupakan salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan melengkapi data yang sudah diperoleh dari teknik lain.
- c. Pertemuan masyarakat merupakan kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga di tingkat RT/RW sebagai wadah untuk melakukan *need assessment* bagi persiapan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pengorganisasian Sosial. Tahap ini dapat dicapai dengan mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada, serta memiliki peran relevan atau *power* dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati, sehingga menjadi fokus peneliti.

3. Asesmen Sosial

Kegiatan pengumpulan data - data mengenai permasalahan, kebutuhan maupun potensi dan sumber yang ada di sekitar masyarakat melalui teknik – teknik, berikut:

a. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* merupakan suatu metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama masyarakat, untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin melalui teknik pengumpulan data, seperti *transect walk* dan pemetaan (wilayah, masalah dan sumber), penelusuran sejarah, diskusi klasifikasi kesejahteraan, diskusi terfokus dalam media *community meeting forum*, diagram venn jaringan organisasi; dan teknik-teknik asesmen non-partisipatif seperti mini survei, wawancara dan studi dokumentasi.

b. *Methodology Participatory Assessment (MPA)* merupakan pendekatan untuk menemukan dan menggali masalah, kebutuhan dan kekuatan masyarakat secara partisipatif. Sheafor (2003) mengemukakan bahwa MPA sebagai teknik dalam melakukan asesmen terhadap permasalahan dengan melibatkan masyarakat untuk menentukan, merencanakan, dan memutuskan permasalahan yang dihadapi. Digunakan untuk mengidentifikasi atau menemukannya kebutuhan dan potensi yang ada didalam atau luar masyarakat.

Saat pelaksanaan MPA pemimpin kegiatan hanya berperan sebagai fasilitator yang memberi arahan kepada warga agar dapat menemukan sendiri kebutuhan dan potensi tersebut dengan langkah - langkah: 1) menjelaskan maksud, tujuan dan proses; 2) mengidentifikasi masalah; 3) menentukan prioritas masalah; 4) melakukan analisis masalah (faktor penyebab dan akibat masalah); dan 5) mengidentifikasi sumber berdasarkan prioritas masalah.

4. Penyusunan Rencana Intervensi

Teknik-teknik perencanaan partisipatif antara lain dengan diskusi perencanaan tindakan yang diambil dari *Technology of Participation* (TOP) adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasan. Teknologi partisipatif mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan dan tanggung jawab dari seluruh warga yang hadir. Teknik ini dapat membantu *target group* untuk menghasilkan kegiatan operasional dengan tiga tahapan dasar, antara lain:

- a. Tahap Diskusi, serangkaian pertanyaan yang memandu dan membimbing kelompok di dalam proses dialog melewati empat tingkatan kesadaran, yakni objektif, reflektif, interpretatif, dan memutuskan.
- b. Tahap Lokakarya, proses lima langkah yang mengorganisasi para anggota kelompok ke arah pendalaman diskusi dan mencapai konsensus atau kesepakatan bersama tentang tindakan yang tepat dilakukan oleh kelompok. Lima langkah tersebut yaitu penentuan konteks, sumbang saran, menyusun kategorisasi, memberikan label atau penamaan, dan perenungan atau refleksi.

- c. Tahap Rencana Tindak, digunakan untuk membuat rencana secara rinci terkait tindakan yang akan dilakukan setelah terjadi konsensus untuk melakukan kegiatan melalui proses tujuh langkah yang mengorganisir para anggota kelompok ke arah penyusunan rencana yang realistis dan mudah dilaksanakan. Langkah - langkah tersebut adalah penentuan konteks, lingkaran sukses, kondisi objektif, menyatakan komitmen, lokakarya menentukan tindakan yang diperlukan, penjadwalan dan penugasan, serta refleksi.
5. Pelaksanaan Intervensi dipilih disesuaikan dengan hasil asesmen dan pilihan strategi dan taktik (kolaborasi, kampanye, atau kontes) yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan.
6. Evaluasi, Terminasi dan Rujukan, sebagai kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik selama proses maupun hasil untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan dengan langkah berikut ini:
 - a. Penetapan kondisi awal – kondisi akhir.
 - b. Menyediakan lembar peniaian monitoring dan evaluasi.
 - c. Tempel lembar penilaian kondisi awal dan akhir di dinding yang sudah disediakan untuk di evaluasi.
 - d. Membaca matrik monitoring, serta evaluasi proses dan hasil.
 - e. Teknik evaluasi dalam pengembangan masyarakat juga hendaknya dilaksanakan secara partisipatif menggunakan diskusi terfokus yang dilengkapi dengan wawancara mendalam atau pengungkapan pengalaman perubahan.

Menurut Netting, et al (2004) terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami masalah, populasi dan arena sebagai unit analisis dalam pengembangan masyarakat dengan melibatkan dua kegiatan utama mempelajari literatur dan mewawancarai populasi yang terkena masalah, yakni:

1. Penelitian Aksi Partisipatoris (*participatory action research*).

Penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para anggota masyarakat dalam menegosiasikan topik penelitian, format maupun analisis data. Relasi antara peneliti dan partisipan yang diteliti bersifat resiprokal (timbang-balik dan setara) dimana keduanya sama-sama saling belajar dan mengajari satu sama lain yang diarahkan agar penelitian menghasilkan aksi atas hasil rumusan bersama secara sadar oleh peneliti dan partisipan.

2. Asesmen Kebutuhan atau Aset (*needs/assets assessment*).

Memberikan data mengenai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dapat digunakan didalam kegiatan-kegiatan advokasi.

3. Evaluasi Pemberdayaan (*empowerment evaluation*).

Menggunakan konsep, teknik, dan temuan untuk melakukan perbaikan dan penentuan keputusan bersama. Meneliti efektifitas berbagai jenis kegiatan dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah tertentu dan meningkatkan kapasitas dalam melakukan evaluasi mandiri.

4. Demistifikasi (*demystification*).

Menggali dan menggaris bawahi isu atau kejadian yang tersembunyi, menghimpun dan mempertimbangkan suara dan pandangan dari kelompok minoritas atau lemah yang seringkali terpinggirkan oleh kelompok dominan.

Intervensi dalam praktik pekerjaan sosial digunakan juga pada pengembangan masyarakat atau sebagai suatu model intervensi yang sangat memperhatikan pada aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Hati Adi Isbandi (2013), mengemukakan bahwa intervensi komunitas dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu antara lain:

1. Tahap Persiapan: Pertama, terhadap pelaku perubahan yang merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan yang secara tidak langsung bertujuan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim mengenai pendampingan masyarakat. Kedua, saat dilapangan dengan mengetahui gambaran umum kondisi masyarakat, adat istiadat, kondisi sosio demografisnya, dan yang lebih penting adalah rencana dari output pendampingan. Ketiga, pelaku perubahan melakukan perizinan dengan pihak terkait yang menaungi komunitas tersebut dan harus melakukan kontak dengan para pemimpin lokal sehingga hubungan dapat terjalin baik dengan masyarakat pada saat proses pendampingan berlangsung.
2. Tahap Asesmen: Mengidentifikasi masalah, kebutuhan masyarakat dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran melalui berbagai teknik, salah satunya menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threat*). Proses ini sudah harus melibatkan masyarakat secara aktif agar dapat mengetahui permasalahan yang sedang dirasakan dan muncul dari pandangan masyarakat dilingkungan sekitar itu sendiri.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program: Melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk melakukan tindakan terkait dengan mengatasi dan memecahkan masalah, serta masyarakat diantisipasi dapat memunculkan sejumlah program dan kegiatan alternatif yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang sedang dirasakan saat ini.
4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi: Membantu dalam merumuskan dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan membantu merancang kegiatan yang menjadi sumber prioritas.
5. Tahap Pelaksanaan atau Implementasi Program: Salah satu langkah atau tahapan yang paling signifikan dalam proses pengembangan masyarakat sebagai proses intervensi yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan seperti melakukan kerjasama antara warga masyarakat dengan pelaku perubahan maupun antar warganya sendiri.
6. Tahap Evaluasi: Sebagai proses pengawasan pada tahapan intervensi bersama warga dan pelaku perubahan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada proses ini sebaiknya melibatkan warga karena diharapkan akan terbentuk sebuah keberlanjutan dari kegiatan tersebut dan membentuk sesuatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal yang mampu melaksanakannya dengan mandiri.
7. Tahap Terminasi: Proses pemutusan kontrak antara pelaku perubahan dengan masyarakat atau komunitas karena sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran terkait target yang henda dicapai, namun secara hubungan emosional masih berlangsung. Terminasi dilakukan karena dirasa

masyarakat sudah dapat dikatakan mandiri, tetapi kadang-kadang karena program harus diakhiri karena telah melampaui batas kontrak yang ada atau anggaran telah habis dan tidak ada lagi sumber pendanaan.

Tahapan dalam pengembangan masyarakat berdasarkan hasil penelitian tindakan yang dilakukan oleh Hati Getar & Adi Isbandi (2016) melalui identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi, yaitu terdapat tiga tahap sebagai berikut ini:

1. Tahap *think* (perencanaan), proses ini merumuskan rencana program aksi yang mengukur kondisi saat ini dan menetapkan kondisi yang diharapkan melalui strategi pelatihan dan pendampingan, serta strategi pengontrolan proses perubahan perilaku. Pada tahap proses perencanaan melibatkan beberapa tokoh yang berperan di masyarakat untuk memberikan masukan dalam rancangan intervensi program, perumusan tujuan dan strategi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di komunitas sasaran berdasarkan hasil asesmen.
2. Tahap *act* (implementasi), proses mengimplementasikan rencana dan strategi yang dirumuskan berdasarkan sumber daya yang dapat diakses bertujuan untuk mengupayakan perubahan perilaku komunitas sasaran melalui suatu program dengan beberapa kegiatan, seperti pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan komunitas, sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan agar permasalahan - permasalahan yang khas dari masing - masing partisipan dapat diupayakan solusinya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki. Kegiatan pendampingan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kunjungan ke rumah partisipan (*home visit*) dan berdiskusi secara informal.

- 3 Tahap *look* (evaluasi), menunjukkan adanya output perubahan perilaku dari partisipan atau sebagai hasil dari program intervensi. Evaluasi ini ditujukan untuk melihat proses perubahan yang dilakukan oleh komunitas sasaran serta melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut, dan setelah dilakukan upaya intervensi.

2.1.7 Pekerja Sosial dengan Komunitas

Pekerja sosial sebagai profesi pertolongan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi dalam melaksanakan fungsi praktiknya yang memusatkan pada keberfungsian sosial. (Huraerah. A., 2024). Netting (2010) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas.

Praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas pada dasarnya merupakan proses pemberian kekuatan kepada komunitas untuk meningkatkan keberdayaan diri melalui pengembangan masyarakat (Ocktilia. H., 2020). Pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat lokal merupakan kegiatan intervensi praktik makro berbasis masyarakat yang difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu untuk tujuan pengembangan, pencegahan atau penanganan permasalahan sosial, serta berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas yang memfokuskan pada pendekatan ekologi dalam upaya untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
3. Memperoleh masukan tentang peluang - peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses dan pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan.

Menurut Zastrow dalam Adi (2018: 255-259) mengemukakan bahwa pekerja sosial memiliki empat peran dalam melakukan pengembangan masyarakat yaitu sebagai berikut;

1. Fasilitator, peranan sebagai pendorong, pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada pada tekanan situasional dalam mengaktualisasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitas agar mereka dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif.
2. Broker/ Penghubung, bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasi jaringan pelayanan sosial dengan pemetaan sistem - sistem sumber yang berkualitas dan dapat diakses, menghubungkan masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan sumber tersebut secara konsisten, serta mengevaluasi efektivitas sumber dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
3. Mediator, peran ini diperlukan ketika terjadi perbedaan yang terjadi dalam masyarakat dan mengarah pada konflik, peran mediator disini menengahi atau menjadi kekuatan ketiga untuk menjembatani dari kedua belah pihak. Kegiatan

yang dilakukan pekerja sosial sebagai mediator mencakup kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan macam - macam resolusi konflik lainnya yang berfokus pada *win - win solution* dalam suatu mediasi.

4. *Advocate/* Pembela, peran pekerja sosial ini bertugas sebagai pembela dan memberikan pendampingan ketika ada hak - hak masyarakat yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak luar, serta kepentingan dalam segala hal yang berhubungan dengan lembaga pelayanan lain untuk menjamin masyarakat dalam mencapai pelayanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan peran pekerja sosial bersama komunitas yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada peran pekerja sosial dalam hal pengumpulan dan analisis data teknis; fasilitator pembentukan kelompok dan pemberian dukungan semangat; dan representasional dalam membangun jejaring kerja dan menghubungkan dengan sistem sumber (Anjani et al., 2020). Pembahasan berikutnya, mendalami tentang konsep pekerja sosial dengan lanjut usia, karena dalam penelitian ini lansia menjadi fokus sasaran yang dituju untuk perubahan.

2.2 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Lanjut Usia

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2012) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai suatu kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Pengertian di atas menjelaskan bahwa keberfungsian sosial merupakan maksud dari profesi pertolongan pekerjaan

sosial. Hampir sama dengan definisi di atas, *International Federation of Social Workers* (IFSW) yang dikutip dari Suharto (2014:24) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut :

“...Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan, pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat menggunakan teori - teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial..”

Pekerjaan sosial, berdasarkan pada pertemuan Federasi Sosial Internasional di Montreal, Kanada pada Juli (2000), mempromosikan terciptanya perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang fundamental bagi pekerjaan sosial (Isbandi,2013).

Max Siporin, pada Pengantar Kesejahteraan Sosial yang dialih bahasakan oleh Fahrudin (2012) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosial mereka.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang tidak hanya memberikan pertolongan manusia

sebatas memampukan individu untuk memecahkan masalahnya, lebih pada pencapaian hak-hak hidup masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai, etika dan pengetahuan ilmiah. Permasalahan lansia menjadi sasaran profesi pekerjaan sosial.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dalam memecahkan masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan dengan lingkungan sosialnya.

Tujuan pekerjaan sosial menurut Pujileksono (2018) meliputi: a) Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*to enhance the problem-solving and coping capacities of people*); b) Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan (*link people with system that provide them with resources, services and opportunities*); c) Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi (*promote the effective and humane operation of these system*); d) Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute of the development and emprovenment of social policy*).

Tujuan pekerjaan sosial di atas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam kemampuan pemecahan masalah, menyediakan sumber, meningkatkan efektivitas sistem, dan kontribusi pada pengembangan kebijakan sosial untuk individu, keluarga, atau masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan.

2.2.3 Pekerja Sosial dengan Lanjut Usia

The College of Social Work dalam laporan yang disusunnya bersama dengan *Gerontological Social Work* (G8) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial gerontologis adalah pekerjaan sosial yang berhubungan dengan lanjut usia. Pekerja Sosial dengan lanjut usia memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia dan keluarga mereka melalui upaya penguatan dan promosi kemandirian, otonomi dan martabat (TCSW,2017).

Senada dengan hal tersebut, menurut *The Irish Association of Social Worker* (IASW) pekerja sosial lanjut usia memiliki peran pada pelestarian atau peningkatan fungsi dan kualitas hidup lanjut usia. Pekerja sosial berfokus pada apa yang dapat dilakukan lansia dan memaksimalkan peluang dan kualitas hidup dalam konteks sistem sosial, kebutuhan, dan hak-haknya. Menurut IASW (2011), peran pekerja sosial dengan lanjut usia yaitu: a. Melakukan asesmen kebutuhan (*need assesment*); b. Melakukan asesmen pekerjaan sosial; c. Memberikan konseling dan terapi; d. Melakukan manajemen stres; e. Memberikan advokasi; f. Pengembangan komunitas; g. Mengembangkan dan membuat rancangan perawatan.

Pembahasan selanjutnya adalah membahas variabel penelitian sebagai bagian penting atau landasan dari fenomena yang akan diteliti untuk mengungkap hubungan atau korelasi antara teori - teori tersebut.

2.3 Kajian tentang Perencanaan Terintegrasi

Perencanaan merupakan fungsi utama manajemen dalam sebuah program atau bersifat paling mendasar sebagai proses terpenting atau memegang peran lebih dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya

tidak dapat berjalan (Indartono, 2013). Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan di tingkat komunitas atau masyarakat adalah perencanaan yang bersifat sektoral dan memerlukan advokasi dalam memberi masukan jika pada sistem perundang-undangan atau kebijakan khususnya di tataran lokal (Ocktilia, 2020).

Integratif merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris dan dalam KBBI, integratif itu sendiri bersifat integrasi yang artinya pembauran hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh atau terpadu. Pendekatan integratif dalam bidang pendidikan, menurut Depdikbud dalam Ujang Sukardi (2003: 35) adalah model pembelajaran terpadu yang terbagi menjadi (1) Holistik, artinya memahami suatu fenomena dari segala sisi, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian; (2) Bermakna, yakni pengkajian materi pada suatu fenomena dengan membentuk jalinan antar konsep - konsep yang saling berhubungan; 3) Otentik, dipahami secara langsung terkait prinsip dan konsep yang ingin dipelajari, maka informasi yang diperoleh akan lebih otentik; 4) Aktif, yakni menekankan keaktifan dalam pembelajaran secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan secara terus-menerus, sehingga akan termotivasi untuk belajar.

Pendekatan integratif dalam ilmu kesehatan dengan aspek holistik yaitu menggabungkan berbagai aspek untuk mencapai kesehatan yang optimal, seperti menjembatani ilmu biomedis dengan ilmu sosial dan perilaku dengan memahami hubungan antara faktor sosial, perilaku, psikologis, dan biologis dalam kesehatan,

serta mencakup berbagai upaya untuk menjangkau semua pihak, lintas sektoral dengan melibatkan lintas keilmuan (Wirawan, 2022). Dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dalam mendukung satu kebijakan prioritas, serta diperlukan adanya kombinasi dari berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat memicu kerjasama yang kuat antar lembaga, sebab pendekatan ini mensyaratkan bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program prioritas (Bappeda, 2019). Pendekatan integratif dalam perencanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi kesehatan merupakan pendekatan yang ideal dalam membangun karakter dengan pola partisipasi, kolaborasi dan keterpaduan dalam sistem organisasi pendidikan baik internal maupun eksternal yang menuntut optimalisasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter (Kurniawan, 2023).

Pendekatan Integratif berdasarkan beberapa bidang diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan integratif dapat dimaknai sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa aspek, elemen, atau sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling terkait ke dalam satu proses atau melihat gambaran keseluruhan. Integratif didalam penelitian ini mengacu pada upaya untuk menciptakan suatu rencana yang komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan saling mempengaruhi. Konteks yang digunakan didalam perencanaan integratif ini, yaitu 1) Holistik, melihat suatu masalah dari berbagai perspektif, tidak hanya secara parsial, namun menggunakan empat aspek (kesehatan, sosial, ekonomi, spiritual); 2) Sistematis, menganggap

bahwa setiap bagian dari sistem saling terkait dan mempengaruhi bagian lainnya; 3) Partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (internal dan eksternal) dalam proses perencanaan; dan 4) Berkelanjutan: mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan program pelayanan yang efektif, efisien, sinergi, komprehensif.

Perencanaan terintegrasi atau terpadu (*integrated planning approach*) dalam strategi pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan sosial dapat diartikan sebagai suatu pendekatan perencanaan yang melibatkan pemangku kepentingan seperti partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga pemerintah, sektor swasta dengan memperhitungkan aspek/ bidang ilmu lain secara sinergis, fleksibilitas, dan menyeluruh (holistik) (Mulalinda, et al. 2022).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau tujuan yang tidak realistis artinya proses ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan peluang keberhasilan implementasi suatu program. Keterpaduan menjadi kata kunci dalam menetapkan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pelibatan pelaku (pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat) dan sumber daya sesuai dengan prosedur yang harus ditempuh. Misalnya, perencanaan dalam program kemiskinan, maka semua sektor (ekonomi, pemukiman, kesejahteraan sosial, pendidikan) akan terlibat dalam proses, mengikutsertakan pengaruh lingkungan dan melibatkan beberapa daerah atau wilayah.

Menurut Komet Mangiri (2000) mendeskripsikan bahwa didalam perencanaan terpadu terdapat empat aspek, yaitu:

1. Keterkaitan. Sebuah perencanaan yang baik akan mempertimbangkan pengaruh satu aspek dengan bidang lainnya. Keterkaitan dijelaskan dalam bentuk pola hubungan saling mempengaruhi dan mendukung antarsektor atau organisasi yang ada dalam suatu wilayah tertentu.
2. Kuantitas. Menunjukkan seberapa besar keterkaitan bidang atau sektor dengan bidang lainnya. Misalkan pengaruh sektor ekonomi terhadap lingkungan sosial dan budaya atau sebaliknya. Besarnya pengaruh program di suatu daerah akan mengindikasikan gejala atau perubahan daerah disekelilingnya. Besarnya perubahan peran di masing - masing sektor atau bidang terkait terhadap pencapaian tujuan bersama. Perencanaan terpadu mengisyaratkan aspek ketersediaan data dan informasi yang memungkinkan untuk mengukur keterkaitan suatu perencanaan program dengan hasil yang dicapai dengan mempertimbangkan daya dukung bidang lain.
3. Optimalisasi. Menunjukkan pemanfaatan masukan atau input yang paling optimal untuk mendapatkan output atau hasil yang diharapkan. Persoalan perencanaan terpadu akan memperhitungkan sumber daya dan lingkungan yang tersedia dengan perubahan yang diharapkan serta bermakna bagi masyarakat. Disamping itu bagaimana masyarakat dapat menindaklanjuti hasil dari program yang telah direncanakan bersama. Input optimum diperoleh dari alokasi sumber daya yang terbatas, sedangkan output optimum dengan pencapaian target yang dicanangkan. Pilihan minimum terhadap input dan maksimum terhadap output atau kombinasi dari kedua pilihan merupakan salah satu kasus tersendiri dalam aspek optimalisasi.

4. Resiko. Menunjukkan asumsi suatu perencanaan tidak selalu sukses mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini selaras dengan kenyataan di lapangan antara aspek yang diperhitungkan dalam perencanaan seringkali terjadi kesenjangan atau penyimpangan baik secara terkontrol maupun sebaliknya. Berbagai faktor mulai dari kemampuan perencana, alat perencanaan, informasi yang digunakan sampai pada pelaksanaan di luar perkiraan akan menjadi pertimbangan dalam keterpaduan suatu rencana pembangunan.

Pentingnya mengembangkan proses perencanaan menjadi sesuatu hal yang terpadu atau terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dan tantangan di masa akan datang dengan memberikan solusi yang komprehensif dan menyediakan sumber daya yang memadai dalam mencapai tujuan melalui pengambilan keputusan secara partisipatif dan alokasi sumber daya yang tersedia (Amirudin et al., 2014).

Menurut (Sasoko, 2022) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya perencanaan integrasi, yaitu:

1. Memberi arah dengan adanya pedoman saat pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan.
2. Mengurangi ketidakpastian dengan dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) mengenai potensi, prospek perkembangan, hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi dalam masa pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi dengan cara yang terbaik (*the best combination*).

4. Meningkatkan kontrol dan koordinasi dengan adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan sebagai evaluasi.
5. Memperbaiki manajemen waktu melalui penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran dan kegiatan.

Menurut Adisaputro (2014) sebuah perencanaan memberikan beberapa manfaat penting yaitu; 1) terpeliharanya penyesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terkoordinasi; 2) menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya sebagai alat untuk menghemat dan peningkatan; 3) menemukan, memperbaiki dan mengurangi ketidakpastian atau penyimpangan secara dini atas perubahan yang mungkin terjadi agar bisa diantisipasi dengan baik sebagai alat ukur atau monitoring berbagai keberhasilan secara intensif; 4) membantu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sebagai alat standardisasi dalam pengawasan dan evaluasi; dan (5) memberikan kemudahan dalam berkolaborasi dengan pihak terkait sebagai pegangan dalam menetapkan kegiatan - kegiatan yang harus dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan terintegrasi di dalam manajemen pengubahan komunitas adalah sebuah proses yang baik akan dicirikan oleh sejauh mana rencana yang dihasilkan dapat berperan optimal sebagai penuntun arah, dengan demikian, manfaat utama dalam hal ini adalah menentukan sebuah pilihan alternatif terhadap keputusan untuk mempermudah pencapaian tujuan dengan menata masa depan melalui koordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, serta pelibatan berbagai aspek lintas sektor atau interdisipliner.

Setiap perencanaan yang baik bukan dituntut untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan saja, tetapi juga harus mampu memperkirakan kendala yang harus dihadapi guna mencapai masa depan. Hal ini bertujuan agar proses perencanaan yang matang dan terintegrasi menghasilkan keluaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan keputusan dengan membandingkan pencapaian hasil terhadap target melalui pemanfaatan umpan balik yang diterima dan disusun secara teratur dan baik.

2.4 Kajian tentang Perencanaan Berkelanjutan

Berkelanjutan (*sustainability*) merupakan konsep yang multidimensi dan mencakup tiga pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam penerapannya, menekankan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab guna memastikan kelestarian dan efisiensi jangka panjang. Hal ini meliputi penggunaan sumber daya secara bijaksana, perlindungan terhadap kualitas lingkungan saat ini, serta pemenuhan kebutuhan generasi mendatang tanpa mengorbankan keberlanjutan untuk generasi masa depan (Gurses et al., 2021).

Menurut Salim (2010), konsep keberlanjutan dalam konteks pemanfaatan aset komunitas bermakna bahwa program tidak dilaksanakan hanya dalam waktu pendek, tetapi direncanakan untuk di masa yang akan datang dan diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sosial), pertimbangan ekuiti yang adil dan berkualitas (ekonomi), serta lingkungan hidup untuk berkembang secara seimbang.

Salah satu komponen kunci dalam perencanaan berkelanjutan adalah penekanan pada pendekatan partisipatif dengan melibatkan atau mengikutsertakan

secara aktif kontribusi yang substansial dari masyarakat, kelompok minoritas, berbagai lapisan masyarakat dan pihak berkepentingan (pemerintah) dalam menentukan tindakan yang perlu diambil secara menyeluruh dan memiliki peran sebagai fasilitator dan mendukung dalam merespon aspirasi masyarakat terkait fasilitas yang dibutuhkan (Anggi. et al., 2023). Strategi berkelanjutan berdasarkan berbagai konsep dapat dirumuskan sebagai prinsip dasar. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, keadilan sosial, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang (Jaya, Askar. 2004).

Menurut Suharto (2005), monitoring dan evaluasi memiliki tujuan masing-masing yang berbeda satu sama lain dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Monitoring bertujuan untuk; 1) Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber - sumber dalam rencana digunakan; 2) Bagaimana kegiatan - kegiatan dalam implementasi dilaksanakan; 3) Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak; dan 4) Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Evaluasi bertujuan untuk; 1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan; 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran; 3) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi - konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (*externalities*).

Hal yang dapat menentukan keberlanjutan (*sustainability*) yaitu salah satunya dilatarbelakangi oleh prinsip monitoring dan evaluasi (moneva) sebagai bentuk pemantauan. Hasil dari proses ini sendiri dapat digunakan untuk mengungkap tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan menentukan langkah

selanjutnya (Kurniawati, 2013). Dalam program perubahan komunitas yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan lansia pada penelitian ini, proses moneva dilakukan secara partisipatif bersama pihak yang terkait dalam perencanaan terintegrasi untuk memastikan agar hasil pelaksanaannya dapat tetap berjalan secara berkesinambungan. Partisipasi berarti keikutsertaan, peran serta, atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan, namun arti dari partisipasi bukan hanya sekadar ambil bagian/ pengikutsertaan dalam suatu perencanaan dan kegiatan, tetapi mengandung tiga gagasan pokok, yaitu keterlibatan mental dan emosi, dorongan untuk memberikan sumbangan, serta penerimaan tanggung jawab (Huraerah, 2011).

Program perubahan komunitas yang berkelanjutan menuntut elastisitas komunitas dalam menghadapi kejadian dan berbagai tekanan dari pihak luar atau mampu beradaptasi dengan dukungan tersebut, serta mampu berlanjut walaupun tanpa *supporting* dari luar, namun perlu dengan adanya komitmen. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sasaran keberlanjutan melalui pendekatan sosial budaya yang berjalan dengan baik dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut karena adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan yang berkelanjutan (Marianus M. B., et al., 2022).

2.5 Kajian tentang Desain Perencanaan Terintegrasi Berkelanjutan

Berdasarkan identifikasi model awal yang dilakukan peneliti dalam kegiatan praktikum manajemen perubahan komunitas, menghasilkan pengembangan desain baru atau rekayasa teknologi yaitu perencanaan terintegrasi berkelanjutan

dalam program pelayanan kesejahteraan lanjut usia di Yayasan Usaha Mulia Cianjur. Desain ini merupakan hasil dari sintesis atau diperoleh melalui proses penggabungan atau penyatuan kedua konsep menjadi satu kesatuan yang baru dan utuh, sehingga diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding dengan penyusunan konsep secara individual.

Menurut Suharto, 1997 dalam Buku Zubaedi (2013) menjelaskan bahwa program atau kegiatan didalam pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah, bukan untuk mengganggu atau memperburuk kondisi mereka, oleh karena itu program senantiasa dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan manajemen perubahan komunitas yaitu mulai dari perencanaan, pengkoordinasian sampai monitoring dan evaluasi yang melibatkan beberapa aktor seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta para mitra terkait untuk bekerjasama.

Konsep desain perencanaan terintegrasi berkelanjutan pada penelitian ini sebagai salah satu fungsi atau proses manajemen perubahan komunitas dalam merumuskan tujuan, menetapkan suatu strategi untuk mencapai tujuan, menyusun rencana melalui tindak lanjut guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan yang menggabungkan konsep, prinsip, dan praktik dari berbagai teori atau disiplin ilmu untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang lebih holistik dan komprehensif dalam memahami atau mengelola suatu fenomena atau masalah untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dengan menjaga proses

tetap berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan tercapainya tujuan yang diharapkan masyarakat melalui adanya komitmen, sehingga dapat menciptakan kondisi yang saling melengkapi dan memberikan manfaat maksimal.

Hal ini didalam manajemen perubahan komunitas juga merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dan dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan akhir menjadi mutu dan lebih efektif. Secara keseluruhan perencanaan terBAbntegrasi berkelanjutan ini memberikan kerangka kerja penting untuk menghadapi dan membantu dalam menangani tantangan dan permasalahan, khususnya pada kesejahteraan lanjut usia melalui pendekatan yang lebih kompleks dan adaptif dengan cara yang lebih efisien dan efektif, serta berfokus atau mengacu pada usaha yang dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan ketimpangan, melainkan fokus pada pembangunan masyarakat yang adil dan setara, menciptakan masa depan yang lebih seimbang mengentaskan kemiskinan, memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan yang dibutuhkan, mencapai potensi atau mencakup inklusi sosial dan hak asasi manusia.

Proses pelaksanaan perencanaan ini diawali dari melakukan kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal sebagai proses bekerjasama dan berkoordinasi, kemudina melaksanakan diskusi dengan para pihak terkait untuk mengamati dan mengumpulkan data lansia, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, merumuskan tujuan dengan memperhatikan keempat aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia, selanjutnya tahap lingkaran sukses bertujuan untuk memotivasi agar

tercapainya tujuan yang disepakati secara berkualitas, setelah itu mengidentifikasi kenyataan situasi atau realita bertujuan untuk sesuatu hal yang dihasilkan dapat diimplementasikan, selanjutnya seluruh pihak membaca kembali setiap tahapan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan memiliki atas apa yang sedang direncanakan, membentuk tim kerja masyarakat dan menuliskan beberapa kalimat yang menyatakan komitmen dengan janji hati sebagai tanggung jawab, merumuskan atau menentukan jadwal kegiatan dan tahap terakhir merefleksikan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

Manfaat dari perencanaan ini adalah menghasilkan solusi yang lebih kuat dan dapat mengatasi berbagai aspek masalah secara lebih komprehensif, meningkatkan pemahaman terkait permasalahan dari berbagai sudut pandang yang dapat mengarah pada wawasan lebih mendalam dan keputusan lebih baik, serta adanya fleksibilitas untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan secara spesifik dan dinamika yang ada melalui multidisiplin yaitu menggabungkan berbagai perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda untuk memahami dan mengelola masalah secara lebih menyeluruh. Adaptabilitas yaitu memilih dari berbagai teori yang paling sesuai dengan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi secara spesifik, serta cenderung lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan baru dalam teori dan praktik. Komprehensif yaitu menyediakan kerangka kerja lebih luas dan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dalam suatu sistem atau organisasi termasuk faktor internal dan eksternal.

Perencanaan program dalam pengembangan masyarakat perlu diusahakan untuk memenuhi kriteria SMART, maksudnya adalah *simple* (mudah dipahami), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *realistic* (sesuai sumber) dan *time-related* (sesuai waktu) dalam mengefektifkan, kemudian mengefisienkan dari sisi waktu dan sumber daya (manusia, uang, material), selanjutnya dalam mekanisme atau tata cara yang mudah, sederhana, dan fleksibel. Perencanaan komprehensif ini dapat membantu sebuah organisasi dengan memberikan rencana untuk bergerak dari mimpi kepada tindakan, lalu kepada hasil positif yang dirasakan masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, manfaatnya tidak bisa lebih banyak dinikmati, meninggalkan komunitas lokal tanpa keuntungan yang berarti, maka perencanaan terintegrasi secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk dilakukan.

2.6 Kajian tentang Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia

2.6.1 Definisi Lanjut Usia

Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang berusia mencapai 60 tahun ke atas. Lansia terbagi menjadi lansia potensial dan lansia non potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan lansia non potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidup bergantung pada orang lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998).

Menurut Ratnawati Nugroho dalam Ruswadi & Supriatun (2022) mengartikan bahwa “lansia merupakan kelompok usia yang berada pada tahap akhir dari fase kehidupan dan akan mengalami proses menua ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi seperti mengalami perubahan fisik yang cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan fisik dan psikis”.

Lanjut usia cenderung mengalami penurunan frekuensi aktivitas, berkurangnya keterlibatan dalam interaksi dengan lingkungannya dan peranan dalam keluarga atau masyarakat, kehilangan pekerjaan, sehingga seringkali merasa kesepian, bosan dan menyebabkan kondisi ekonominya memburuk (Akbar, 2019).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan salah satu fase hidup yang akan dialami oleh setiap orang. Fase tersebut ditandai dengan penurunan fungsi fisik, biologis, psikologis maupun sosial yang dapat mempengaruhi kemampuannya secara keseluruhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka diperlukan layanan kesejahteraan yang terintegrasi berkelanjutan dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup.

2.6.2 Perubahan pada Lanjut Usia

Menurut Potter and Perry dalam Alfianto, dkk. (2022), dalam proses seseorang menjadi tua akan mengalami banyak perubahan, antara lain meliputi:

1. Perubahan Fisiologis

Kesehatan lanjut usia umumnya berkaitan dengan persepsi pribadi mengenai fungsi tubuh. Lansia yang memiliki jadwal atau rutinitas harian lebih sering beranggapan dirinya sehat, sementara lansia dengan masalah fisik, emosional, serta kehidupan sosial yang membatasi kegiatan, lebih cenderung percaya bahwa diri mereka sakit. Kulit keriput, rambut mulai menipis, gangguan pendengaran, dan perubahan lainnya sering terjadi pada lansia yang dapat meningkatkan kerentanan seorang lansia terhadap berbagai penyakit, meskipun tidak bersifat patologis. Perubahan fisik terkait usia yang terjadi secara terus menerus dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status kesehatan, pola hidup, stres, dan kondisi lingkungan.

2. Perubahan Fungsional

Hal ini sangat penting dalam menentukan seberapa mandiri seorang lansia yang memiliki kemampuan pada fungsi fisik, psikososial, dan kognitif. Kemunduran fungsional dapat mempengaruhi kapasitas fungsi dan kesejahteraan lansia. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyakit yang diderita dan seberapa parah penyakit tersebut dilihat dari perubahan mendadak, menunjukkan indikasi buruknya keadaan kesehatan lansia, serta kecakapan dan perilaku hati-hati dalam aktivitas sehari-hari.

3. Perubahan Kognitif

Perubahan struktur serta fisiologi otak (jumlah sel yang menurun dan kadar neurotransmitter yang berubah) terjadi pada lansia beserta atau tanpa terjadi penurunan kognitif. Disorientasi, keterampilan berbahasa yang menurun, kemampuan berhitung dan penilaian yang buruk adalah contoh gejala penurunan kognitif yang tidak terkait dengan penuaan yang wajar.

4. Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial terkait usia meliputi proses perubahan melalui kehidupan dan mengalami kehilangan. Semakin lama usia yang dijalani maka banyak perubahan kehidupan dan perasaan kehilangan yang mereka alami. Perubahan kehidupan, yang biasanya ditandai dengan rasa kehilangan, pensiun, dan perubahan situasi keuangan, serta perubahan tugas dan hubungan, kesehatan, produktivitas, dan kondisi lingkungan. Selain itu keterbatasan dalam produktivitas kerja sering dikaitkan dengan perubahan psikososial.

Terdapat beberapa kehilangan yang dialami lansia bila telah memasuki masa pensiun diantaranya:

- a. Kehilangan finansial (pendapatan berkurang)
- b. Kehilangan status (jabatan/posisi, fasilitas)
- c. Kehilangan teman/kenalan atau relasi
- d. Kehilangan pekerjaan/kegiatan

Kehilangan berkaitan erat dengan hal-hal berikut ini:

- a. Perasaan dan kesadaran akan menjelang ajal, gaya hidup berubah seperti pindah tempat perawatan misalnya panti sosial yang mengakibatkan pergerakan menjadi lebih terbatas.
- b. Perekonomian berubah akibat kehilangan atau berhenti bekerja, yang meningkatkan biaya hidup dan tagihan medis.
- c. Mengalami penyakit kronis serta kesehatan memburuk.
- d. Terputus dari kehidupan sosial, timbul rasa kesepian, merasa kehilangan yang berhubungan dengan kehilangan orang terdekat misalnya keluarga
- e. Pada saraf sensorik, yang menyebabkan masalah kesehatan dan pendengaran.
- f. Kehilangan kekuatan dan kekuatan fisik (perubahan persepsi dan konsep diri).

Perubahan psikologis lansia dipengaruhi oleh perasaan kehilangan lansia. Lansia mengalami masalah psikologis yang erat kaitannya dengan spiritualitas, misalnya seperti: kehilangan seseorang yang dikasihi, mengalami penurunan kesehatan karena penyakit fisik yang parah. Hal ini berdampak pada keadaan spiritualitas lansia. Biasanya, seiring bertambahnya usia, mereka menjadi lebih sadar akan perlunya mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasa terdorong untuk menjalankan ibadah yang ketat.

5. Perubahan Spiritualitas

Perubahan spiritual lanjut usia disebabkan akibat terjadinya aging process yang berkaitan dengan pengalaman hidup yang di jalani lansia semasa hidupnya. Lansia dengan pengalaman kehidupan yang luas cenderung akan menjalani transisi pada spiritualitasnya, sebab lansia telah berkembang dalam segi psikologis sehingga mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini membuat lansia semakin dapat merasa bersyukur pada kehidupannya dan mempengaruhi perubahan nilai yang dianut sesuai dengan keyakinan serta budaya lansia berada.

2.6.3 Permasalahan Lanjut Usia

Menurut Kartinah dan Sudaryanto (2008) menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami individu usia lanjut diantaranya:

1. Masalah Ekonomi. Salah satunya diisyaratkan oleh adanya penurunan produktivitas kerja dikarenakan sudah memasuki masa pensiun sehingga berhenti dari pekerjaan utamanya, maka berakibat pada turunnya pendapatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari – hari seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta kebutuhan sosial rekreasi. Saat berada dikondisi tersebut pada umumnya lansia mendapatkan bantuan dari anak atau sanak saudara, tabungan dan dana pensiun termasuk kesehatan. Lansia yang mendapatkan bantuan tersebut tentunya tidak menjadikan masalah, namun bagi lansia yang tidak memiliki tabungan ataupun dana pensiun, maka akan membawanya kepada tanggungan keluarga yaitu anak atau cucu, jika yang tidak memiliki anak dan keluarga, dengan demikian status ekonomi lansia tersebut pada kategori miskin dan terlantar.

2. Masalah Sosial. Ditandai dengan mulai berkurangnya kontak sosial dengan anggota keluarga, teman kerja maupun anggota masyarakat yang berakibat putusnya hubungan kerja karena pensiun. Sikap individualis masyarakat sekarang ini juga memberi pengaruh besar kepada lansia yang menyebabkan lansia menjadi kurang mendapatkan perhatian. Pada fase usia lanjut ini, mereka biasanya ingin diperlakukan kembali seperti anak kecil dikarenakan mudah menangis oleh karena rasa kesepian berlebih. Hal yang perlu dilakukan agar lansia tersebut bisa berhubungan sosial kembali, salah satunya dengan kelompok pendukung, sehingga lansia dihari tuanya berkesempatan untuk menikmati hidup dengan interaksi sosial.
3. Masalah Kesehatan. Ditandai oleh adanya penurunan produktivitas, salah satunya yakni penurunan fisik dalam hal kesehatan, lebih rentan untuk terkena penyakit, maka dari itu diperlukan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk memantau fisik dari seorang lansia. Dalam menunjang kesehatan dimasa tua harus didukung juga dengan pemenuhan gizi lansia seperti memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh lansia karena dengan mengatur kebutuhan gizi ditambah adanya pemeriksaan kesehatan, maka taraf hidup lansia pun akan meningkat dan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yakni peningkatan usia harapan hidup manusia di Indonesia pun akan tercapai.
4. Masalah Psikososial. Sesuatu hal yang berakibat munculnya gangguan keseimbangan jiwa, misalnya kebingung, panik, depresi, dan lain-lain yang biasanya disebabkan karena muncul stres psikososial paling berat, misalkan kematian keluarga dekat, pasangan hidup, berurusan dengan hukum, sakit yang

menahun sehingga tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Mengingat masalah di usia lanjut yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah salah satu kelompok penduduk yang rentan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan psikososial. Agar lansia tetap sehat, sejahtera dan berguna diperlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga maupun masyarakat. Permasalahan lansia tersebut merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk lansia itu sendiri.

2.6.4 Bentuk Dukungan Lanjut Usia

Sheridan dan Radmacher (1992), Sarafino (1998) serta Taylor (1999) dikutip dalam Lilik (2011) menjabarkan lima dukungan sosial, yaitu:

1. Dukungan Instrumental (*tangible assistance*)

Berwujud penyediaan materi yang bisa memberikan pertolongan langsung seperti mendapat pinjaman uang, diberikan suatu barang, makanan serta pelayanan untuk lansia. Dukungan ini bisa mengurangi rasa stress karena seorang lansia dapat langsung menyelesaikan masalahnya dengan materi atau barang pemberian, maka bentuk dukungan instrumental yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar lansia dalam menjalani aktivitas kehidupannya ini dirasa sangat diperlukan sebagai dukungan paling utama, terutama bagi lanjut usia yang non-potensial dan ditambah hidup sebatang kara atau tidak memiliki keluarga, maka bagi keluarga kerabat lansia yang masih ada sangat dianjurkan untuk memberikan dukungan instrumental, begitu juga dengan kondisi saat ini yaitu dimana terdapat kenaikan jumlah lansia setiap tahunnya, sehingga negara wajib untuk memberikan dukungan tersebut kepada para lansia sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia.

2. Dukungan Informasional

Diwujudkan dengan adanya suatu pelibatan lansia dalam pemberian informasi, saran atau pendapat dari atau kepada lansia tersebut yang diberikan oleh keluarga terdekat lansia dan cenderung nasehat untuk mengingatkan sesuatu yang harus atau tidak harus dilakukan demi kebaikan diri lansianya. Jenis informasi seperti ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah karena dukungan ini menguatkan komunikasi diantara lansia dengan keluarga atau individu yang ada disekitarnya, serta lansia juga dapat menyalurkan setiap keluhan lansia apabila ada sesuatu yang ingin utarakan.

3. Dukungan Emosional

Wujud dari dukungan ini membuat lansia nyaman dan dapat menghadapi permasalahan dengan lebih baik karena merasa dipedulikan dan dicintai oleh sumber dukungan sosial seperti itu keluarga, kerabat dan tetangga atau di dalam panti jika lansia tersebut hidup di panti. Contohnya seperti, memberikan hiburan agar tidak stress dengan dibelikan sesuatu yang disukai, menjadi tempat untuk cerita tentang apa yang sedang dirasakan, dan lain - lain. Dukungan ini sangat penting ketika lansia menghadapi keadaan yang dianggap sulit untuk dikontrol.

4. Dukungan pada Harga Diri

Dukungan berupa pemberian penghargaan positif dan semangat, persetujuan pada pendapat lansia seperti menerima nasihat, wejangan ataupun doa, memberikan perbandingan yang positif terhadap lansia lain seperti memberikan pujian, dan meyakinkan lansia tersebut bahwa ia memiliki keahlian yang tidak dimiliki lansia lain. Wujud adanya dukungan ini membantu lansia dalam membangun harga diri

dan kompetensinya, sehingga lansia akan merasa dihargai dan dianggap sebagai orang yang dituakan serta dihormati.

5. Dukungan dari Kelompok Sosial

Wujud adanya dukungan ini akan membuat lanjut usia akan merasa bahwa ia merupakan anggota dari kelompok yang memiliki persamaan dalam hal minat dan aktivitas sosial dengan lansia tersebut, sehingga merasa memiliki teman senasib. Penting bagi lansia untuk dapat berinteraksi sosial dengan individu atau lansia lain di lingkungannya, seperti dalam kelompok pengajian, kegiatan senam lansia dan lain-lain yang mewadahi lansia dalam suatu kegiatan sehingga terdapat aktivitas interaksi antar lansia ataupun lansia dengan individu atau masyarakat.

2.6.5 Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik secara materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri (Suparlan, 1983). Huraerah (2011: 45) menyatakan bahwa pelayanan sosial adalah kegiatan terorganisir bertujuan untuk membantu warga negara yang menghadapi masalah karena ketidakmampuan keluarga mereka dalam melaksanakan fungsinya.

Dwi Heru Sukoco (2006:103) dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial menjelaskan bahwa pelayanan sosial pada prinsipnya mempunyai tiga unsur yaitu:

1. Pelayanan sosial merupakan aktivitas profesi pekerjaan sosial bersama dengan profesi lain (bukan monopoli profesi pekerjaan sosial).
2. Pelayanan sosial ditujukan untuk membantu orang agar:
 - a. Lebih berkecukupan dan dapat mengembangkan diri (*more self sufficient*)

- b. Mencegah ketergantungan (*preventing dependency*)
 - c. Memperkuat relasi keluarga (*strengthening family relationship*)
 - d. Memperbaiki individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (*restoring individual, families, groups and communities*)
3. Pelayanan sosial diberikan agar penerima pelayanan dapat berfungsi baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, jenis pelayanan sosial yang diberikan dalam panti, meliputi: (Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012, h.7)

1) Pemberian tempat tinggal yang layak; 2) Jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan; 3) Pengisian waktu luang termasuk rekreasi; 4) Bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama, dan; 5) Pengurusan pemakaman/ sebutan lain.

Berdasarkan konteks pelayanan sosial lanjut usia, menurut Mohamad Tohari (2017) yang dimaksud dalam pelayanan adalah sejalan dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial pada umumnya, namun bagi lansia terdapat dua poin, yakni:

1. Bersifat pencegahan, termasuk dalam kegiatan yang bersifat kampanye guna penyadaran masyarakat tentang perlakuan yang manusiawi terhadap lanjut usia, penanaman nilai - nilai luhur penghormatan kepada orang yang berusia lanjut dan program perlindungan dan pelayanan luar panti yang ditujukan guna mencegah lanjut usia mengalami keterlantaran dan permasalahan sosia lainnya.
2. Bersifat perawatan dan pemulihan, dilakukan dalam pelayanan panti maupun luar panti dan terdapat pula pelayanan sebagai bentuk pengembangan potensi sesuai dengan kemampuan, khususnya lansia yang produktif agar tetap aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2.6.6 Fungsi Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Menurut Muhidin (Sulistyo, 2005:18) ada tiga macam fungsi pelayanan sosial diantaranya: 1) Sebagai suatu pengembangan dan sosialisasi untuk menanamkan nilai dan norma yang ada didalam suatu masyarakat; 2) Sebagai penyembuhan, rehabilitas, dan perlindungan. Pelayanan sosial ini membantu suatu individu atau masyarakat yang mengalami masalah dan mampu kembali menjadi pribadi yang semakin membaik dari sebelumnya; 3) Sebagai akses yaitu pelayanan dalam birokrasi. Dalam fungsi ini pelayanan sosial berupaya memberikan bantuan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait informasi yang ada.

Jusman Iskandar (2005: 498) merangkum pendapat Alfred J. Khan (1973) dengan menyatakan bahwa fungsi pelayanan sosial adalah memulihkan kondisi kehidupan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan orientasi manusia terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri, memobilisasi dan menciptakan sumber daya masyarakat untuk tujuan pembangunan, serta menyediakan struktur kelembagaan untuk berfungsinya pelayanan terorganisir lain.

2.6.7 Pelayanan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lanjut Usia

Posbindu adalah kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor Penyakit Tidak Menular (PTM) secara mandiri dan berkesinambungan (Kemenkes RI, 2014).

Sedangkan menurut Erpandi (2019) mengatakan bahwa “Posbindu adalah sebutan untuk posyandu lansia yang merupakan pos pelayanan bagi lansia di wilayah tertentu yang telah disepakati secara terpadu. Posbindu digerakkan atas inisiatif dari masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagai kebutuhan khususnya bagi warga lanjut usia”.

Tujuan Posbindu adalah untuk meningkatkan kenyamanan lansia dalam menggunakan berbagai pelayanan, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan

lainnya yang dilaksanakan melalui berbagai unsur terkait (Komnas Lansia, 2010). Sementara itu, menurut Kemenkes (2014), tujuan didirikannya Posbindu adalah untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat pada umumnya, sehingga pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan lansia, serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup lansia dengan mengedepankan kontrol PTM.

2.6.8 Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Baharuddin (2008: 31) menjelaskan bahwa kata “kesejahteraan mengandung dua makna, yakni pertama individu atau kelompok memiliki keadaan yang sehat, bahagia dan adanya kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Kedua, kegiatan atau prosedur yang didesain guna memenuhi kebutuhan dasar fisik maupun materi untuk mencapai *well-being*”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Secara normatif upaya mewujudkan kesejahteraan sosial lansia ini tercantum dalam Undang - undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia, pada pasal 4 menyebutkan “upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta mendekatkan diri kepada Tuhan YME”. Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa “kebutuhan-kebutuhan lansia, meliputi: a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan kesempatan kerja; d) pelayanan pendidikan dan pelatihan; e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g) perlindungan sosial; h) bantuan sosial”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2004, “Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hal ini dikhususkan bagi seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”. Sementara yang termasuk program – program kesejahteraan sosial lanjut usia adalah 1) Pelayanan Sosial Lanjut Usia; 2) Kelembagaan Sosial Lanjut Usia; 3) Perlindungan Sosial dan; 4) Aksesibilitas Lanjut Usia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan suatu organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum/ tidak. Pada Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Berdasarkan landasan tersebut, pelayanan sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini juga berlaku untuk beberapa panti sosial yang menerapkan pelayanan sosial

sesuai dengan peraturan yang telah tertera dalam Undang - Undang tentang Kesejahteraan Sosial, sehingga kesejahteraan sosial lansia dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bagi lansia, seperti kebutuhan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual melalui kegiatan program atau pelayanan kesejahteraan kelompok lansia.

2.7 Kajian tentang Teori Sistem

Teori sistem dalam penelitian ini digunakan sebagai sebuah sistem dengan dikonseptualisasikan pada suatu proses yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir dan menjadi sebuah sistem mutu lebih efektif. Artinya didalam setiap pembahasan pada suatu tahapan proses tersebut terdapat input, outcome, proses, dan output, dimana hal ini berkaitan sangat erat dengan teori sistem.

Menurut Ryan dalam Azwar (2010) sistem adalah gabungan dari elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Sistem menurut John Mc dalam Azwar (2010) adalah suatu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi - fungsi saling berhubungan dan bekerja sebagai suatu unit organik untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Menurut Azwar (2010) pengertian sistem secara garis umum dapat dibedakan atas dua macam yakni:

1. Sistem sebagai Suatu Wujud, apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu wujud yang ciri-cirinya dapat dideskripsikan dengan jelas.
2. Sistem sebagai Suatu Metode, apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang

terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metode yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi, contohnya adalah sistem pengawasan yang bagian atau elemen pembentuknya dari berbagai peraturan.

2.7.1 Ciri-ciri Sistem

Menurut Shode dan Voich (1979) dalam Azwar (2010) ciri-ciri sistem dibedakan atas enam macam yakni: a. Sistem mempunyai tujuan dan karena itu semua perilaku yang ada pada sistem pada dasarnya bermaksud mencapai tujuan tersebut (*purposive behavior*). b. Sistem sekalipun terdiri dari berbagai bagian atau elemen, tetapi secara keseluruhan merupakan suatu yang bulat dan utuh jauh melebihi kumpulan bagian atau elemen tersebut. c. Berbagai bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem saling terkait, berhubungan serta berinteraksi. d. Sistem bersifat terbuka dan selalu berinteraksi dengan sistem lain yang lebih luas, yang biasanya disebut dengan lingkungan.

2.7.2 Unsur-Unsur Sistem

Menurut Azwar (2010) telah disebutkan bahwa sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, bagian atau elemen tersebut banyak macamnya, yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan dalam enam unsur, yaitu:

1. Masukan (*Input*). Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya suatu sistem tersebut. Pembagian masukan yang dikenal masyarakat ialah yang disebut sebagai 4M yakni manusia (*man*), uang (*money*), sarana (*material*) dan metode (*method*) untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan. Menurut Bruce (1990),

Fromberg (1988) dan Gambone (1991) unsur masukan terdiri dari tiga macam, yaitu tenaga (*man*), dana (*money*), dan sarana (*material*).

2. Proses (*Process*). Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Proses juga disebut sebagai fungsi administrasi, yang terpenting ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian.
3. Keluaran (*Output*). Kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem.
4. Dampak (*Impact*). Akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistem.
5. Umpan Balik (*Feed Back*). Kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut.
6. Lingkungan (*Environment*). Dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem.

Teori sistem digunakan dalam konsep manajemen perubahan komunitas untuk memberikan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas sistem sosial secara komprehensif karena masyarakat atau komunitas dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen saling berkaitan, berhubungan dan berinteraksi.

2.8 Kajian tentang Rekayasa Teknologi

2.8.1 Definisi Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial

Kata rekayasa, berasal dari bahasa Inggris *engineering* yang berasal dari kata *engine* dan *ingenious* (bahasa Latin), *ingenerare* artinya “menciptakan”. Rekayasa teknologi (*engineering technology*) adalah ilmu pengetahuan secara

praktis untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia nyata, maka rekayasa teknologi pada dasarnya berfokus pada penerapan prinsip - prinsip ilmiah untuk memecahkan berbagai masalah atau tantangan dalam kehidupan sehari - hari. Seluruh kegiatan rekayasa diawali dari adanya masalah terlebih dahulu. Pemecahan masalah tersebut melalui dengan merancang, memodifikasi, mengembangkan, menemukan hal baru atau menciptakan inovasi (Pujileksono, et al. 2021).

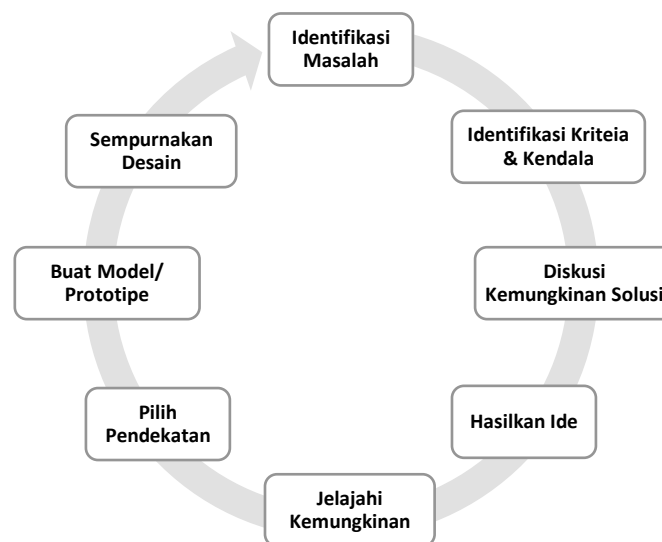
Rekayasa teknologi pekerjaan sosial adalah proses membuat model, modifikasi, mengembangkan atau menciptakan teknologi baru guna meningkatkan proses atau fungsi yang ada (Pujileksono, 2021 dalam Rustiani, dkk. 2022). Dalam proses rekayasa, pekerja sosial bertanggung jawab atas penelitian, analisis, desain, dan pengembangan gagasan yang berpotensi bermanfaat bagi praktik pekerjaan sosial. Keterampilan yang dibutuhkan untuk proses ini bersifat konseptual, membutuhkan pemahaman teoritik, metode, dasar - dasar desain, dan pertimbangan etika (Yuliani & Pujileksono, 2021). Berdasarkan uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekayasa teknologi dalam penelitian ini adalah proses membuat, mendesain, modifikasi, mengembangkan atau menciptakan teknologi baru guna meningkatkan efektivitas proses atau fungsi yang ada dan efisiensi.

2.8.2 Proses Desain Rekayasa Teknologi

Proses desain rekayasa merupakan langkah metodologi untuk memecahkan masalah dengan menciptakan sesuatu yang nyata (*tangible*) dengan fungsi tertentu. Terdapat pelibatan dua model utama dalam melakukan proses rekayasa teknologi, diantaranya yaitu model STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematic*) dan model siklus dalam mencapai hasil yang optimal.

Model STEM adalah proses desain rekayasa teknologi yang melibatkan pendekatan secara terintegrasi dan komprehensif yaitu mencakup empat disiplin ilmu utama dan setiap elemen tersebut berkontribusi signifikan dalam merancang dan mengembangkan solusi teknis yang inovatif. Proses ini diawali; 1) Identifikasi Masalah; 2) Diskusi Pemecahan Masalah; 3) Mendesain; 4) Membuat atau Mewujudkan Desain; dan 5) Berbagi solusi (Pujileksono, dkk., 2021).

Poses rekayasa teknologi juga dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada model siklus yaitu menekankan pada pentingnya umpan balik berkelanjutan dan literasi dalam proses rekayasa teknologi, sehingga memungkinkan adanya adaptasi untuk perbaikan terhadap perubahan kebutuhan serta kondisi operasional dengan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tetap relevan dan efektif dalam seiring waktu. Tahapan model siklus ini, seperti berikut:



Gambar 2.1 Proses Rekayasa Teknologi Model Siklus

2.9 Kajian tentang *Community Engagement*

Dunham, et al (dalam Johnston & Taylor, 2018) menawarkan empat kategori *community* yang dapat digunakan untuk memahami konsep “tujuan

bersama”. Salah satunya adalah lokasi, yaitu kelompok atau individu yang terhubung melalui tempat – tempat yang didefinisikan secara geografis, di mana mereka tinggal atau bekerja. Tujuan *community* berdasarkan lokasi adalah pelestarian atau perbaikan tempat yang mereka tempati, maka dari itu, komunitas merupakan komponen yang berfokus pada bagaimana individu atau kelompok terlibat dan membawa perubahan.

Engagement merupakan proses interaktif dan dinamis, di mana partisipasi, pengalaman, dan tindakan bersama menjadi komponen utama. Pada *collective level*, *engagement* dicatat sebagai konsep yang mendukung pemberdayaan anggota komunitas (Johnston & Taylor, 2018). Heath (2018) menjelaskan bahwa adanya *engagement* memberikan manfaat sosial serta kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan mengingatkan organisasi bahwa mereka beroperasi sebagai instrumen atau cerminan dari suatu wilayah, membuat keterlibatan sangat penting bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif.

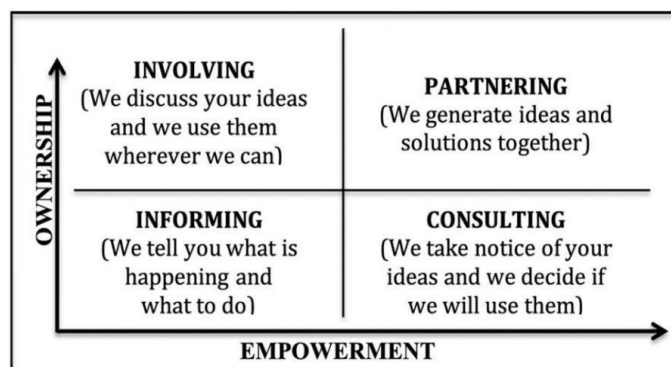
Berdasarkan dua definisi diatas, secara konseptual *community engagement* didefinisikan sebagai proses relasional yang memfasilitasi pemahaman dan evaluasi, keterlibatan, pertukaran informasi dan pendapat mengenai suatu konsep, isu, atau proyek, dengan tujuan membangun modal sosial dan meningkatkan hasil sosial melalui pengambilan keputusan (Johnston & Taylor, 2018). *Community engagement* juga dipahami sebagai partisipasi anggota masyarakat yang kooperatif dan saling mendukung dalam proses pembangunan (Lane & Hicks, 2014).

Pendekatan keterlibatan yang berfokus pada komunitas sebagai aktor utama dari objek pembangunan, dan melihat mereka sebagai sistem manusia yang hidup

terdiri dari kepercayaan, komunikasi, tindakan dan reaksi, pembentukan makna, dan emosi (Lewis et al., 2008). Terdapat tiga jenis *community engagement* yang dikemukakan oleh Johnston (2018) dan diadopsi dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Community Information*, keterlibatan yang sukses didasarkan pada informasi efektif, tepat, dan informasi tepat waktu, diberikan untuk anggota masyarakat.
2. *Community Consultation*, proses digunakan untuk meminta pendapat dan pandangan dari individu dan anggota masyarakat yang berkepentingan terkait dengan masalah organisasi tertentu.
3. *Community Participation*, menunjukkan peran aktif anggota masyarakat dalam menciptakan makna dan mengembangkan solusi untuk masalah sosial yang kompleks atau solusi yang diusulkan berdampak pada komunitas tertentu (Janse & Konijnendijk dalam Johnston, 2010). Jenis keterlibatan masyarakat ini dianggap sebagai tingkat tertinggi, dan mencakup pemberdayaan anggota masyarakat serta kolaborasi sejati antara organisasi dan masyarakat.

Model kepemilikan dan pemberdayaan menurut Yudarwati & Gregory (2022) diadopsi untuk menjelaskan aspek - aspek *community engagement*.



- a. *Informing*, proses memberikan informasi yang seimbang dan objektif kepada publik guna membantu memahami masalah, alternatif, peluang, dan solusi.

- b. *Consulting*, proses mendapatkan umpan balik dari publik mengenai analisis, alternatif, dan/atau keputusan.
- c. *Involving*, proses bekerja langsung dengan publik sepanjang proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi publik dipahami maupun dipertimbangkan secara konsisten.
- d. *Partnering*, proses bermitra dengan publik dalam setiap aspek keputusan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan.

Tiga jenis *community engagement* dan empat level ini merupakan bentuk operasional dalam mengategorikan hasil interaksi dan respons balik yang diberikan, sehingga dapat menggerakkan partisipasi masyarakat. Pertama, *informing*, untuk memahami bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait program yang dijalankan. Kedua, *consulting*, cara mendengarkan dan mengakui aspirasi masyarakat serta memberikan umpan balik terhadap masukan yang diterima. Ketiga, *involving*, memahami bagaimana kekhawatiran dan aspirasi masyarakat dijadikan alternatif dari keputusan yang telah ada. Keempat, *partnering*, untuk memahami bagaimana masyarakat diminta untuk memberikan saran dan inovasi, termasuk rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Chin & Hampton (2020) partisipasi didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam sebuah komunitas tertentu untuk memecahkan masalah mereka sendiri atau yang terjadi di lingkungan dan hal tersebut memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam perspektif interpretatif, partisipasi, dialog dan pandangan aktif individu merupakan bagian penting untuk menilai lingkungan. Nilai yang sangat dihargai dalam partisipasi menunjukkan rasa

hormat dan apresiasi terhadap keunikan dan identitas lingkungan (Servaes, 2020).

Dalam sebuah komunitas akan ada keterikatan antar satu anggota dengan anggota yang lain. Frekuensi bertemu yang tinggi dan saling berbagi info pada tiap waktunya akan membuat antar anggota memiliki keterikatan untuk membangun jaringan pertemanan yang semakin kuat, saling memperhatikan dan sharing untuk tetap menjaga keterikatan di dalam komunitasnya tersebut. *Community engagement* merupakan suatu upaya yang sistematis, terencana dan terukur untuk meningkatkan keberdayaan pemanfaatan program yang telah disusun oleh kelompok dan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah, mendiskusikan dan membagikan pengalaman.

Terdapat empat cara partisipasi menurut Sherry R. Arnstein (1969) dengan "*Ladder of Citizen Participation*" yang mengklaim partisipatif bersifat berbeda dan dapat diamati dalam sebagian besar proyek pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pelaksanaan: Masyarakat didorong dan dimobilisasi secara aktif dengan diberikan tanggung jawab dan menetapkan tugas, seperti menyediakan sumber daya yang diperlukan.
- b. Partisipasi dalam Evaluasi: Masyarakat diundang untuk memberikan kritik dan saran mengenai keberhasilan/ kegagalan dari proyek yang telah dilaksanakan.
- c. Partisipasi dalam Manfaat: Masyarakat turut dalam menikmati hasil dari proyek yang telah dilaksanakan.
- d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat terlibat dalam memulai, mendiskusikan, mengonseptualisasikan dan merancang kegiatan yang akan dilakukan bersama sebagai komunitas.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mengarah pada individu yang mampu dan bersedia untuk mengambil bagian dalam keputusan yang berkaitan dengan keputusan kehidupan mereka sendiri (Mefalopulos, 2008). Martinez et al., (2017) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan sering kali dikaitkan dengan tiga konsep lain, yakni:

- a. Pemberdayaan dan Kekuasaan, sering kali dikaitkan dengan titik awal yang dicirikan sebagai kurangnya kekuasaan, dapat berupa kekurangan sumber daya pribadi dan komunitas, ketidakselarasan struktural dan masalah sosial lainnya.
- b. Pemberdayaan dan Partisipasi, individu, komunitas, dan politik, dianggap sebagai medium penting untuk mencapai pemberdayaan, menekankan pada agensi, yaitu kapasitas individu untuk bertindak terhadap lingkungan mereka, sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan tingkat pemberdayaan.
- c. Pemberdayaan dan Edukasi, berkaitan dengan proses pemberdayaan dengan pendidikan dan pembelajaran, termasuk penguasaan pengetahuan dan berbagai sumber daya, keterampilan, akuisisi kapabilitas, dan peningkatan kesadaran.

Konsep Keterlibatan Masyarakat (*Community Engagement*) menurut *The Center for Disease Control and Prevention* (CDC) (1997) (dalam bukunya *Principles of Community Engagement Second Edition*, 2011, h.3) adalah proses kolaboratif dengan kelompok-kelompok orang yang berafiliasi dengan kedekatan geografis, minat khusus, atau keadaan yang sama untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari keterlibatan masyarakat adalah membangun kepercayaan, meminta sumber daya baru, membuat komunikasi yang lebih baik dan meningkatkan hasil secara keseluruhan (CDC, 2011, h.3).

Menurut *The International Association of Public Participation*, keterlibatan partisipasi publik didefinisikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dan menggunakan masukan dari publik untuk membuat keputusan yang lebih baik, karena keputusan ini berdampak langsung pada kehidupan, pekerjaan, bermain, belajar, pelayanan dan bisnis.

Penekanan pendekatan partisipasi dalam penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi dengan melibatkan refleksi kritis dan dialog untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku, karena partisipasi tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang tepat. Komunikasi dengan masyarakat tidaklah mudah dan memerlukan *community engagement* yang mencakup partisipasi serta pemberdayaan di semua tingkat. Pendekatan ini juga bertujuan agar semua pihak yang terlibat dapat memberdayakan diri melalui tindakan nyata.

Community engagement memainkan peran krusial dalam mewujudkan perencanaan terintegrasi berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui interaksi antar kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Hal ini dapat memperkuat efektivitas yang sangat bergantung pada kemampuan membangun dan memanfaatkan *bridging social capital*, yaitu jaringan hubungan yang menjembatani berbagai kelompok sosial dengan latar belakang berbeda dengan menciptakan rasa saling percaya, pertukaran informasi, dan kolaborasi, maka penjelasan kajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai teori *bridging social capital*.

2.10 Kajian tentang *Bridging Social Capital*

2.10.1 Konsep Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa tidak mungkin masyarakat, secara individual, menangani berbagai masalah tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari masyarakat lainnya. Modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerjasama, demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). Secara lebih komprehensif Burt (1992) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Adapun Cox (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat berspektrum luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang mampu menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Solow (1999)

mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma dapat diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas.

Menurut Cohen dan Prusak L. (2001), modal sosial adalah setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai - nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dengan dilakukan secara efisien dan efektif. Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), timbal balik, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh atau sebagai kekuatan modal sosial antara lain, sikap partisipatif, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya, mempercayai dan diperkuat oleh nilai - nilai dan norma - norma yang mendukung. Unsur lain sebagai peranan penting dalam modal sosial, agar hasilnya dapat maksimal, jika didukung oleh kemauan masyarakat untuk secara terus menerus semangat proaktif, baik dalam membuat jalinan hubungan, mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru, karena semua unsur inilah menjadi jati diri modal sosial yang sebenarnya.

Menurut Hasbullah (2006), dimensi inti dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola inter relasi timbal balik dan saling menguntungkan, serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial positif dan kuat. Mengikuti Hasbullah, bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat.

2.10.2 Konsep *Bridging Social Capital*

Bridging social capital akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan *networking* yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan timbal balik yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal. Mengikuti Coleman (1999), tipologi masyarakat *bridging social capital* dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi *fight for* (berjuang untuk) yaitu mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok (pada situasi tertentu). Bentuk *bridging capital social* umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat.

Modal sosial dalam pandangan Putnam (2000) merupakan suatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jejaring atau jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi aksi-aksi terkoordinasikan. Rasa saling percaya dapat menjadi perekat bagi individu dalam memanfaatkan modal sosialnya, sementara dalam

berbagai interaksi diperlukan norma-norma yang disetujui untuk dapat mengatur interaksi dan hubungan yang baik antar setiap individu. Jaringan yang dapat terjalin dengan baik juga merupakan elemen penting bagi terciptanya modal sosial yang kuat dan memiliki kebermanfaatannya tinggi dalam menjembatani (inklusif).

Bridging social capital adalah jenis modal sosial menggambarkan hubungan atau menghubungkan orang - orang dalam melintasi belahan yang biasanya memisahkan masyarakat (seperti ras, atau kelas, atau agama) sebagai asosiasi yang 'menjembatani' antara komunitas, kelompok, atau organisasi (Lancee, 2012). *Bridging social capital* menggambarkan hubungan pertukaran sosial, seringkali asosiasi antara orang - orang dengan minat atau tujuan yang sama tetapi membedakan identitas sosial. *Bridging social capital* merupakan modal sosial yang berfokus ke luar, inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik, dan modal sosial yang dapat terlihat paling baik dalam penggambaran klasik masyarakat sipil (Putnam dalam Lancee, 2012). *Bridging social capital* menggambarkan ikatan horizontal yang membentuk kelompok masyarakat heterogen dengan latar belakang berbeda. Istilah menjembatani mengacu pada kemampuan jaringan untuk menciptakan 'jembatan' yang menghubungkan sektor sektor masyarakat, jika tidak, tidak akan pernah bersentuhan.

Klaim umum dalam *bridging social capital* bahwa memiliki efek positif pada informasi dan kepercayaan, sehingga mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi. Sisi positif dari hal ini adalah mendorong kepercayaan di antara jaringan yang lebih perifer, hubungan, dan asosiasi para aktor dengan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi lingkungan mereka, dan berimplikasi pada

kemampuan para aktor untuk melakukan upaya ke arah kemajuan (Lancee, 2012). Modal sosial bridging cenderung mempersatukan berbagai individu dari beragam ranah sosial untuk memenuhi kebutuhan masing masing dalam suatu relasi dan ruang sosial, serta sebagai bentuk dasar yang berperan baik untuk memperoleh dan saling menghubungkan aset-aset eksternal melalui upaya membangun relasi, sehingga mampu membangun timbal balik/*resiprositas* yang lebih luas.

2.10.3 Prinsip *Bridging Social Capital*

Salah satu bentuk modal sosial (social capital) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani atau menyambung relasi antar individu dan kelompok berbeda identitas asal, serta berperan dalam menghubungkan individu dengan karakteristik (sosial, ekonomi, maupun demografis) yang beragam. Hasbullah (dalam Abdullah, 2013) menguraikan bahwa *bridging social capital* menghubungkan banyak pihak dalam kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip kebersamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan kemanusiaan, keterbukaan dan mandiri, hal ini memiliki arti bahwa bentuk modal sosial dalam bridging social capital tidak dapat diperoleh individu sebagai entitas tunggal, melainkan hanya dapat diperoleh dengan adanya kegiatan dan upaya kolektif antar berbagai pihak.

Kebebasan berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatan para aktor dalam kelompok tidak dapat dipaksakan oleh satu sama lain. Para aktor tersebut bebas untuk saling memberikan upaya dalam meningkatkan aset dan sumber daya yang dimiliki. Bridging social capital terbentuk dari berbagai relasi yang dibangun oleh para aktor yang meyakini nilai serta tujuan yang sama. Keterbukaan dari para aktor yang terlibat hubungan dan segala kegiatan kolektif dibutuhkan dalam hubungan

bridging social capital. Keterbukaan terhadap segala informasi dan memungkinkan yang didapatkan tersebut adanya pertukaran ide serta gagasan masing-masing kelompok dalam mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Social bridging memungkinkan penyebaran jaringan dan akses terhadap sumber daya dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya secara maksimal, oleh karena itu, keterbukaan menjadi suatu keharusan untuk disadari masing-masing pihak yang menjalin relasi.

Prinsip persamaan, artinya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok. Prinsip kebebasan, artinya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide kreatif muncul dari dalam diri untuk memperkaya ide kolektif yang tumbuh tersebut, sehingga dapat mengembangkan kelompok. Kebebasan tercipta dari beragam pikiran anggotanya.

Prinsip kemajemukan dan humanitarian tidak dapat dicegah apabila telah terbentuk relasi dalam modal sosial, artinya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam pengembangan suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain adalah dasar - dasar ide humanitarian. Konsekuensi dari masyarakat yang menyandarkan pada *bridging social capital* biasanya heterogen dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya dan suku, memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan/ koneksi keluar dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan.

2.10.4 Manfaat Bridging Social Capital

Manfaat bridging social capital sangat luas dan dapat mencakup peningkatan kemampuan untuk mengumpulkan informasi, mendapatkan akses, meningkatkan toleransi dan penerimaan pihak lain, maupun memperluas jaringan dan peluang organisasi berkembang (Claridge, 2018). Berikut ini manfaat yang dirumuskan Claridge dari berbagai teori mengenai bridging social capital:

1. Meningkatkan peluang dalam mengumpulkan informasi dari berbagai pihak melalui relasi hubungan eksternal.
2. Mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan akses pada kekuasaan atau penempatan yang lebih baik dalam jaringan.
3. Meningkatkan kemampuan untuk mengenali peluang baru dengan lebih baik melalui kerja sama dan kolaborasi antar kelompok.
4. Meningkatkan toleransi, penerimaan, nilai, dan kepercayaan yang berbeda melalui kontak dengan beragam orang karena melintasi batas-batas sosial.
5. Memungkinkan kelompok yang berbeda untuk berbagi dan bertukar informasi, ide dan inovasi dan membangun konsensus di antara perwakilan kelompok dari keberagaman kepentingan. Jaringan yang tumpang tindih dapat membuat sumber daya dan peluang di satu jaringan dapat diakses oleh anggota lain.
6. Menjadi pelumas sosial dan berpotensi bekerja sebagai motivasi anggota pada kelompok untuk semakin berkembang melalui kegiatan dan komunikasi dalam membantu anggota berkembang.